

---

---

## **PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SULAWESI**

Savira S. Kasim<sup>1</sup>, Herwin Mopangga<sup>2</sup>, Fitri Hadi Yulia Akib<sup>3</sup>, Rifi Fazrina Djuuna<sup>4</sup>

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia <sup>1,2,3,4</sup>

Email: [safirakasim234@gmail.com](mailto:safirakasim234@gmail.com)

---

*Abstract: This study aims to analyze the effect of minimum wages in Sulawesi on labor absorption and community welfare. The data used in this study came from the Central Statistics Agency (CSA). The analysis method used is panel data regression with the Fixed Effects Model approach. The results of the study showed a significant negative effect of -0.612971 between the provincial minimum wage and the open unemployment rate. The determination coefficient of 0.896 indicates that 89.6% of the variation in the open unemployment rate can be explained by the minimum wage. The impact of the minimum wage policy is influenced by several factors, such as the elasticity of labor demand, the structure of the labor market, and the company's ability to bear additional costs due to wage increases. Meanwhile, the provincial minimum wage has a significant positive effect of 3.411923 on community welfare. The determination coefficient of 0.984 indicates that 98.4% of the variation in community welfare can be explained by the minimum wage. This shows that an adequate minimum wage is very important to meet basic needs, such as food, clothing, and household needs.*

**Keywords: Minimum Wage; Open Unemployment; Community Welfare; Sulawesi.**

---

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum di Sulawesi terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effects Model. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan sebesar -0,612971 antara upah minimum provinsi dan tingkat pengangguran terbuka. Koefisien determinasi sebesar 0,896 menunjukkan bahwa 89,6% variasi tingkat pengangguran terbuka dapat dijelaskan oleh upah minimum. Dampak kebijakan upah minimum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti elastisitas permintaan tenaga kerja, struktur pasar tenaga kerja, dan kemampuan perusahaan untuk menanggung biaya tambahan akibat kenaikan upah. Sementara itu, upah minimum provinsi memiliki pengaruh positif yang signifikan sebesar 3,411923 terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien determinasi sebesar 0,984 menunjukkan bahwa 98,4% variasi kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh upah minimum. Menunjukkan bahwa upah minimum yang memadai sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan kebutuhan rumah tangga.

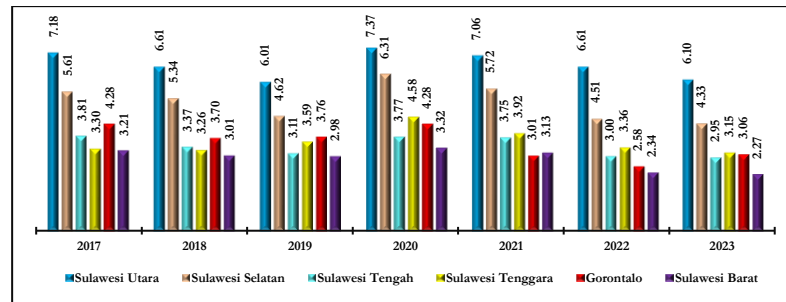
**Kata Kunci: Upah Minimum; TPT; Kesejahteraan Masyarakat; Sulawesi.**

### **PENDAHULUAN**

Peran pemerintah sebagai wujud dalam melindungi kesejahteraan masyarakat, kebijakan upah minimum di Sulawesi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong penyerapan tenaga kerja, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014 menyatakan bahwa pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Pada dasawarsa yang lalu, masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri.

Masalah ketenagakerjaan yang kompleks ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan kebijakan pemerintah, kualitas tenaga kerja, dan dinamika pasar global. Ketimpangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja menjadi tantangan utama, terutama di wilayah-wilayah berkembang seperti Sulawesi. Dampak dari ketidakseimbangan ini tidak hanya terlihat pada meningkatnya angka pengangguran, tetapi juga pada rendahnya kualitas pekerjaan yang tersedia, seperti dominasi pekerjaan di sektor informal dengan tingkat produktivitas yang rendah. Di Sulawesi, persoalan ini semakin nyata ketika tingkat pengangguran terbuka dibandingkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat menjadi indikator yang mencerminkan dinamika pasar kerja di wilayah tersebut, serta menggambarkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.

Di Sulawesi, persoalan ini semakin nyata ketika tingkat pengangguran terbuka dibandingkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat menjadi indikator yang mencerminkan dinamika pasar kerja di wilayah tersebut, serta menggambarkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Berikut adalah data TPT di Sulawesi sebagai salah satu tolok ukur dalam memahami tantangan ketenagakerjaan di wilayah ini:

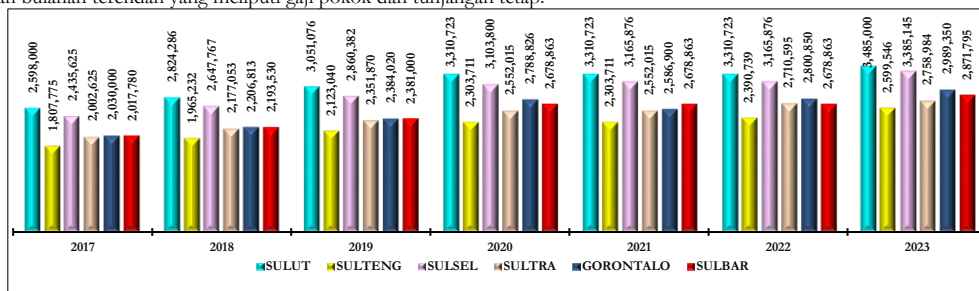


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Tahun 2017-2023

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di enam provinsi di wilayah Sulawesi selama periode 2017 hingga 2023, terlihat adanya variasi tren antarprovinsi. Sulawesi Utara consistently mencatat angka TPT tertinggi di antara provinsi lainnya, dengan puncak 7.37% pada tahun 2020 sebelum menurun bertahap menjadi 6.10% pada tahun 2023. Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan signifikan, dari 5.61% pada 2017 menjadi 4.33% pada 2023, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 6.31%, kemungkinan akibat dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, Sulawesi Tengah memiliki TPT yang relatif rendah, turun secara konsisten dari 3.81% di tahun 2017 menjadi 2.95% di tahun 2023. Di Sulawesi Tenggara, TPT sempat meningkat dari 3.26% pada 2018 menjadi 4.58% pada 2020, namun kembali menurun ke 3.15% di 2023. Provinsi Gorontalo mencatat penurunan signifikan dari 4.28% di tahun 2017 ke titik terendah 2.58% pada 2022, meskipun sedikit meningkat menjadi 3.06% di 2023. Sulawesi Barat memiliki TPT terendah di antara provinsi lainnya, turun stabil dari 3.21% pada 2017 menjadi 2.27% di tahun 2023. Secara keseluruhan, meskipun sempat terjadi kenaikan pada tahun 2020 akibat pandemi, mayoritas provinsi di Sulawesi menunjukkan tren penurunan tingkat pengangguran dalam beberapa tahun terakhir.

Di Indonesia, pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja PP No. 78/2015 tentang Upah Minimum. Upah minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada 3 Kebutuhan Fisik Hidup Layak berupa kebutuhan pangan sebesar. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum didefinisikan sebagai "Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

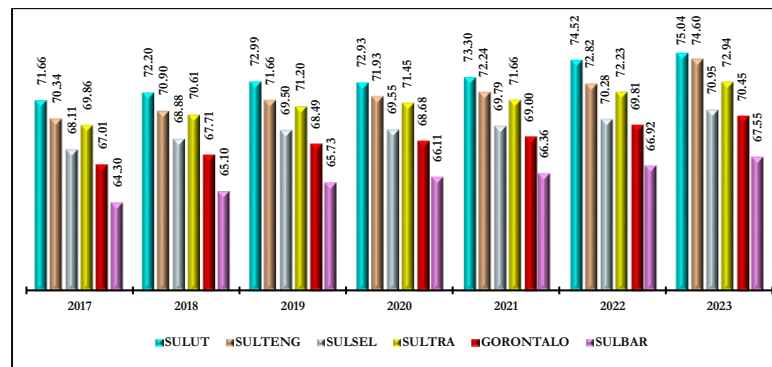


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. Perkembangan Upah Minimum di Sulawesi Tahun 2017 – 2023

Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Yusuf & Al Arif, 2015 z) mengenai hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi angka indeks pembangunan manusia pada suatu wilayah maka akan menyebabkan tingkat pengangguran semakin menurun dan sebaliknya apabila indeks pembangunan manusia rendah akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika IPM rendah maka penyerapan Tenaga Kerja menjadi tidak maksimal.

Salah satu alat ukur atau indikator yang dapat dipakai untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu membawa pada kondisi kesejahteraan masyarakat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin bagus tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tahun 2017-2023

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di enam provinsi di wilayah Sulawesi selama periode 2017 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan IPM di seluruh provinsi. Sulawesi Utara (SULUT) mencatat IPM tertinggi secara konsisten dibandingkan provinsi lainnya, naik dari 71.66 pada tahun 2017 menjadi 75.04 pada 2023. Sulawesi Tengah (SULTENG) juga menunjukkan peningkatan positif dari 70.34 di tahun 2017 menjadi 74.60 di tahun 2023. Sulawesi Selatan (SULSEL) mengalami kenaikan IPM dari 68.11 di tahun 2017 menjadi 70.95 pada 2023, meskipun peningkatannya berjalan lebih lambat dibandingkan provinsi lainnya. Sementara itu, Sulawesi Tenggara (SULTRA) mencatat peningkatan yang stabil dari 69.86 pada tahun 2017 menjadi 72.94 di 2023. Gorontalo juga menunjukkan pertumbuhan dari 67.01 menjadi 70.45, mendekati angka 70, yang mencerminkan peningkatan kualitas pembangunan manusianya. Sulawesi Barat (SULBAR) memiliki IPM terendah di antara provinsi lain di Sulawesi, namun tetap menunjukkan peningkatan dari 64.30 pada 2017 menjadi 67.55 pada 2023. Secara keseluruhan, meskipun tingkat peningkatan bervariasi, semua provinsi di wilayah Sulawesi mengalami tren positif dalam Indeks Pembangunan Manusia selama periode tersebut.

Tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan ekonomi, memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; dan 3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Bappenas, 2010). Kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah upah minimum, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sulawesi. Data yang diambil adalah data tahunan Indonesia yang telah dipublikasikan. Dan waktu penelitian di mulai dari Januari sampai dengan selesai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menganalisis pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas, baik secara parsial maupun secara simultan. Metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data yang bersifat dokumenter, yaitu proses pengumpulan data dari data atau dokumen yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan seperti BPS (Badan Pusat Statistik), dinas terkait dan sumber-sumber lain yang membahas mengenai masalah-masalah ketimpangan seperti media cetak, jurnal ekonomi dan buku-buku referensi tentang pengaruh upah minimum.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data panel yaitu gabungan antara data time series dan data cross section. Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. Definisi operasional atas variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Upah Minimum (X1) adalah Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah, diukur dalam satuan rupiah; 2) Penyerapan Tenaga Kerja (Y1) adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja pada setiap sektor dan di Indonesia selama periode penelitian, diukur dalam jumlah orang; 3) Kesejahteraan Masyarakat (Y2) diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan.

Dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik analisis data panel dengan metode diantaranya: 1) Common Effect Model/Ordinary Least Square Pooled (*Common Effect Model* merupakan pendekatan yang paling sederhana dalam mengolah data panel dengan menggabungkan antara data time series dan data cross section dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*); 2) Fix Effect Model (FEM), metode ini, estimasi dilakukan dengan tanpa pembobotan (*no weight*) atau *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* dan dengan pembobotan (*Cross Section Weight*) atau *General Least Square (GLS)*. Tujuan dilakukannya pembobotan yaitu untuk mengurangi varians antar unit *cross section*; 3) Random Effect Model (REM), Dalam model ini mengasumsikan bahwa komponen error (galat individu) tidak berkorelasi satu sama lain dan komponen error (galat antar waktu dan antar objek) juga tidak berkorelasi. Dalam hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses pendugaan OLS. Syarat untuk menganalisis menggunakan metode ini yaitu data *cross section* lebih besar dari pada banyaknya koefisien.

#### HASIL PENELITIAN

Pada tahap ini akan dibahas hasil penelitian berdasarkan statistik deskriptif yang berkaitan dengan data penelitian (termasuk mengidentifikasi pemilihan model dan hasil estimasi, dan asumsi klasik). Hasil dan pembahasan pengujian hipotesis yang telah diuji secara statistik menggunakan software pengolah data yakni Eviews-12.

Pada analisis data panel, pemilihan model yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Dua model yang sering digunakan dalam analisis data panel adalah model fixed effects dan model random effects.

Untuk menentukan model yang lebih sesuai, uji Chow dan uji Hausman merupakan metode yang umum digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model pooled atau fixed effects, sementara uji Hausman digunakan untuk membandingkan model fixed effects dengan model random effects. Kedua uji ini membantu dalam memilih model yang paling sesuai dengan karakteristik data yang dianalisis, sehingga dapat menghasilkan estimasi yang lebih efisien dan valid`

**Tabel 1. Pemilihan Model Menggunakan Uji Chow**

No	Persamaan	Statistic	d.f.	Prob.
1	UMP Terhadap TPT	43.76625	(5,35)	0.0000***
2	UMP Terhadap IPM	332.242	(5,35)	0.0000***

Simbol:\*\*\*)1%, \*\*)5%, \*)10% dan <sup>TS</sup>)Tidak Signifikan  
 Sumber: Proses Hasil Olahan Data, 2024

Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai p-value sebesar 0.0000 untuk kedua hubungan antara UMP dengan TPT dan IPM, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol yang menyatakan model *common effect* lebih baik dapat ditolak, sehingga model *fixed effects* lebih tepat digunakan.

Setelah pemilihan model menggunakan uji Chow untuk menentukan apakah model pooled atau fixed effects yang lebih tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk membandingkan model fixed effects dengan model random effects dan menentukan model mana yang lebih sesuai untuk analisis data panel.

**Tabel 2. Pemilihan Model Menggunakan Uji Hausmant**

No	Persamaan	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
1	UMP dan TPT	0.238496	1	0.0000***
2	UMP dan IPM	0.209005	1	0.0000***

Simbol:\*\*\*)1%, \*\*)5%, \*)10% dan <sup>TS</sup>)Tidak Signifikan  
 Sumber: Proses Hasil Olahan Data, 2024

Berdasarkan hasil uji Hausman, kedua hubungan, yaitu antara UMP dengan TPT dan UMP dengan IPM, memiliki p-value sebesar 0.0000, yang signifikan pada tingkat 1% (\*\*\*). Ini menunjukkan bahwa hipotesis nol yang mendukung model random effects ditolak. Oleh karena itu, model fixed effects dipilih karena lebih tepat untuk menganalisis hubungan tersebut, mampu menangkap efek individu yang tidak teramati, dan memberikan estimasi yang lebih konsisten.

Setelah pengujian model dengan uji Chow dan Hausman, langkah selanjutnya adalah menyajikan hasil estimasi dari dua hubungan yang dianalisis, yakni antara UMP dengan TPT dan UMP dengan IPM. Berikut adalah hasil estimasi menggunakan *fixed effect model* yang disajikan dalam table 6:

**Tabel 3. Estimasi Koefisien UMP terhadap Variabel TPT dan IPM**

No	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
1	<b>UMP Terhadap TPT</b>				
	Konstanta	5.833189	0.676311	8.625011	0.0000***
	Upah Minimum Provinsi	-0.612971	0.255515	-2.398965	0.0219
	R-squared	0.896326	Durbin-Watson stat		1.840125
	F-statistic	50.43264			
	Prob(F-statistic)	0.000000***			
2	<b>UMP Terhadap IPM</b>				
	Konstanta	61.19457	0.452953	135.1014	0.0000***
	Upah Minimum Provinsi	3.411923	0.171194	19.93015	0.0000
	R-squared	0.984287	Durbin-Watson stat		1.915045
	F-statistic	365.4119			
	Prob(F-statistic)	0.000000***			

Simbol:\*\*\*)1%, \*\*)5%, \*)10% dan <sup>TS</sup>)Tidak Signifikan  
 Sumber: Proses Hasil Olahan Data, 2024

Tabel 3 menyajikan hasil estimasi koefisien pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan model fixed effects. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel tersebut, koefisien dari kedua persamaan diintegrasikan ke dalam persamaan regresi yang telah dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT = 5.833189 - 0.612971UMP + \mu_{it} \dots\dots\dots \text{(Hasil Pers 1)}$$

$$IPM = 61.19457 + 3.411923UMP + \mu_{it} \dots\dots\dots \text{(Hasil Pers 2)}$$

Pada hasil persamaan 1 antara UMP dan TPT, koefisien konstanta sebesar 5,833 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh UMP, tingkat TPT berada pada angka tersebut. Sementara itu, koefisien UMP sebesar -0,613 menunjukkan bahwa peningkatan UMP secara signifikan menurunkan TPT, dengan nilai p-value sebesar 0,0219 yang signifikan pada tingkat 5%. Nilai R-squared sebesar 0,896 mengindikasikan bahwa 89,6% variasi TPT dapat dijelaskan oleh UMP.

Pada hasil persamaan 2 antara UMP dan IPM, koefisien konstanta sebesar 61,195 menunjukkan nilai IPM awal tanpa pengaruh UMP, sedangkan koefisien UMP sebesar 3,412 menunjukkan bahwa peningkatan UMP secara signifikan meningkatkan IPM, dengan p-value sebesar 0,0000 yang signifikan pada tingkat 1%. Nilai R-squared sebesar 0,984 menunjukkan bahwa 98,4% variasi IPM dapat dijelaskan oleh UMP. Kedua hubungan memiliki nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,0000, yang menguatkan signifikansi model. Hal ini menunjukkan bahwa UMP memiliki pengaruh penting dalam menentukan TPT dan IPM.

Setelah menampilkan hasil estimasi, langkah berikutnya adalah menguji validitas asumsi klasik untuk memastikan model yang digunakan memenuhi kriteria estimasi yang andal. Pengujian meliputi uji normalitas untuk memeriksa distribusi residual, uji

heteroskedastisitas untuk mendeteksi varians residual yang tidak konstan, dan uji autokorelasi untuk mengidentifikasi hubungan antar residual dari segi waktu. Tahapan ini penting guna memastikan keakuratan hasil estimasi.

Tabel 4. Analisis Validitas Model Estimasi Berdasarkan Asumsi Klasik

No	Validitas Asumsi klasik	Koefisien	Prob
1	<b>Normalitas data</b>		
	<b>UMP dan TPT</b> Jarque-Bera	2.475318	0.290062 <sup>TS</sup>
2	<b>UMP dan IPM</b> Jarque-Bera	3.115418	0.210618 <sup>TS</sup>
	<b>Heteroskedastisitas</b>		
3	<b>UMP dan TPT</b> UMP vs Residual TPT	0.262234	0.0708 <sup>TS</sup>
	<b>UMP dan IPM</b> UMP vs Residual TPT	-0.297655	0.4577 <sup>TS</sup>
3	<b>Autokorelasi</b>		
	<b>UMP dan TPT</b> Durbin-Watson stat	1.840125	
	<b>UMP dan IPM</b> Durbin-Watson stat	1.915045	

Simbol:\*\*\*)1%, \*\*)5%, \*)10% dan TS)Tidak Signifikan

Sumber: Proses Hasil Olahan Data, 2024

Tabel 4 menyajikan hasil pengujian validitas asumsi klasik untuk model estimasi hubungan antara UMP dengan TPT dan IPM. Dalam uji normalitas, nilai statistik Jarque-Bera untuk kedua persamaan (UMP terhadap TPT dan UMP terhadap IPM) masing-masing menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05 (0.290062 dan 0.210618), yang berarti tidak ada masalah signifikan dalam distribusi residual, dan model memenuhi asumsi normalitas.

Pada uji heteroskedastisitas, koefisien untuk UMP terhadap residual TPT dan IPM menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05 (0.0708 dan 0.4577), yang mengindikasikan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas, atau varians residual yang tidak konstan. Terakhir, untuk uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson untuk kedua persamaan (1.840125 dan 1.915045) berada dalam kisaran yang menunjukkan tidak ada autokorelasi yang signifikan antara residual, menandakan bahwa model tidak mengalami masalah autokorelasi. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model estimasi memenuhi asumsi klasik yang diperlukan, sehingga hasil estimasi dapat dianggap valid dan reliabel.

## PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengujian Hipotesis estimasi dalam model penelitian ini maka dapat ditelaah lebih lanjut mengenai “pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan Masyarakat di Sulawesi”. Dibawah ini merupakan Hasil pengujian dari masing-masing Variabel bebas terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan Masyarakat tahun 2017-2023

**Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja:** Berdasarkan Hasil estimasi menunjukkan bahwa standar upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, peningkatan standar upah minimum cenderung menurunkan angka penganggur, dengan kata lain tenaga kerja telah terserap dengan baik. Hal ini terjadi karena upah minimum berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Semakin rendah nilai tingkat pengangguran terbuka maka semakin besar tenaga kerja yang terserap. Sehingga, hubungan dari kedua variabel diatas dapat dijelaskan melalui insentif yang ditawarkan kepada para pencari kerja atau pengangguran.

**Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat:** Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara standar upah minimum provinsi dan kesejahteraan masyarakat yang diwakili oleh indikator indeks pembangunan manusia. Artinya, kenaikan standar upah minimum berpotensi mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Perkembangan UMP dapat dianggap berkontribusi terhadap peningkatan IPM, karena IPM dihitung berdasarkan rata-rata populasi masyarakat, sementara UMR turut dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi. Kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan hubungan yang kompleks mengenai dampak kebijakan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diproyeksikan dengan indeks pembangunan manusia: 1) Standar upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Dengan kata lain, peningkatan standar upah minimum cenderung menurunkan angka pengangguran, yang mencerminkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja; 2) Terdapat hubungan positif antara standar upah minimum provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan standar upah minimum dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

## SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan upah minimum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, antara lain: 1) Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kondisi ekonomi setiap daerah dalam menetapkan upah minimum, agar kebijakan ini tidak membebani sektor usaha namun tetap efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; 2) Penting untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pekerjaan di sektor formal dan meningkatkan kualitas pendidikan serta keterampilan. Hal ini akan membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia secara lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kuncoro, Engkos dan Ridwan, 2012, "Análisis jalur (Path Análisis), Edisi kedua, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Askenazy, Philippe. 2003. Minimum Wage, Export, and Growth. *European Economic Review* 47 (2003), pp 114 – 167.
- Baihawafí, M., & Sebayang, A. F. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terbuka. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (JRIBB)*, 3(1), 39–44. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1911>
- BAPPENAS, 2007, Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Jakarta
- Borjas, G. J. (2010). Labor Economics. In *The Economics of Human Systems Integration: Valuation of Investments in People's Training and Education, Safety and Health, and Work Productivity*.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dura, Justita. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Naskah Publikasi. STIE Asia Malang.
- Endrico Geraldo Teneh, Anderson G. Kumenaung, Amran T. Naukoko. 2019. Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 19(4).
- Faizin, M. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 214–227. <https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3027>
- Gianie. 2009. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Berpendidikan Rendah. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hadi, A. S., Riani, W., & Haryatiningsih, R. (2022). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (LPM) dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2016-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 446–454. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4470>
- Irawan dan M. Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Edisi ke 6. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kamaruddin. 1994. *Kamus Perbankan*. Jakarta: CV. Rajawali
- Mankiw, N. Gregory (2006), *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga. Salemba Empat Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2010. "Macroeconomics". 7th edition. New York: Worth Publishers.
- Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87–91. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.490>
- Mobiligo, F. (2023). Faktor-Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi (Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo). Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, S. B. (1997). Developmentally appropriate practice in early childhood programs. *Reading Today*, 15 (1), hlm. 24.
- Sadono, Sukirno. 2008. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahara, W. A., & Iryani, N. (2023). PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI SUMATERA BARAT Windy Alifah Sahara \*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 28–43.
- Sania, L., Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan UMR Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Bharanomics*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.189>
- Simanjuntak, L. (1992). *Metode Mengajar Matematika 1*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sugono, Dendy. 2003. *Bahasa Indonesia dalam Media Massa Cetak*. Jakarta: Progres.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Todaro P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*, Jakarta Penerbit: Erlangga
- Waisgrais, Sebastian, 2003. Wage Inequality and the Labor Market in Argentina: Labor Institutions, Supply and Demand in the Period 1980-99. *International Institute for Labor Studies Discussion Paper*. DP/146/2003 pp 1-53, Decent Work Research Programme.
- Yulianty, H., & Indraswanti, B. I. E. (2023). Analysis of the Human Development Index in East Nusa Tenggara 2018-2022. *Jurnal Ekonomi*, 12(04), 1707–1712. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/3189%0Ahttps://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/download/3189/2614>